



108

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan pada Peguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya ,maka dipandang perlu mengatur tata cara dan persyaratan tugas belajar .
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dimaksud , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembatran Negara Repubulik Indonsia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran NegaraRpublik Indonesia Nomor 4193) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Repubublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4018) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaan Negara Repubublik Indonesia Nomor 4019) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Balangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Balangan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Balangan, atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Kepada PNSD yang ditunjuk oleh

Bupati Balangan mengikuti Pendidikan formal kejenjang Pendidikan lebih tinggi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan atau biaya dari Kementerian Negara atau instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Kabupaten Balangan;

8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Bupati ataupun Pejabat lain yang ditunjuk;
11. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan) terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi dilingkungan wilayahnya;
12. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Lembaga Teknis Daerah yang mengelola manajemen bidang kepegawaian di jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Bupati dapat menunjuk dan menugaskan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih

- tinggi secara mandiri ;
- b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya.

(2) Sasaran

- a. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

- (3) Penentuan tugas belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Tingkat pendidikan formal yang dapat ditempuh dalam tugas belajar adalah :

- a. Prgram pendidikan Diploma (D.II, D.III dan D.IV)
- b. Program Pendidikan Sarjana (S-1)
- c. Program Pendidikan Megister/Master (S-2)
- d. Program Pendidikan Doktor (S-3)

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 5

Tugas belajar untuk pendididikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pendidikan tertentu lainnya dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- b. Berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. Adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, Departemen atau instansi penyanggand dana diluar Pemerintah Kabupaten Balangan ;
- d. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin ;
- e. Tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. Daftar penilaian Prestasi Kerja atau DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani ;

Pasal 6

- (1) Disamping ketentuan dalam pasal 5, PNSD yang akan ditugaskan belajar harus mengikuti dan lulus persyaratan administratif dan persyaratan akademis .

- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan :
- a. Program Diploma (D.II dan D.III)
 1. Berusia maksimal 25 tahun;
 2. Serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a).
 - b. Program Diploma (D.IV) :
 1. Berusia maksimal 35 tahun;
 2. Serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - c. Program Sarjana (S-1) :
 1. Berusia maksimal 35 tahun;
 2. Serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - d. Program Magister / Master (S -2) :
 1. Berusia maksimal 45 tahun;
 2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a).
 - e. Program Doktor (S-3) :
 1. Berusia maksimal 45;
 2. Serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata (III/c)
- (3) Masing –masing dengan membuat pernyataan :
- a. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Surat pernyataan sanggup mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Balangan setelah menyelesaikan pendidikan minimal selama 10 (sepuluh) tahun diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
 - c. Surat pernyataan sanggup mengganti biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan karena kelalaian PNSD yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
 - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNSD tugas belajar adalah :
- a. Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA untuk program (D.II, D.III, D.IV DAN S1);
 - b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah S1 untuk program Magester/Mester (S-2);
 - c. Serendah-rendahnya memiliki ijazah S-2 untuk program Doktor (S-3);
 - d. memiliki IPK sesuai ketentuan program studi yang diikuti;
 - e. Mengikuti dan lulus seleksi akademis serta psikotes.

Pasal 7

PNSD yang mengikuti seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh Kementerian Negara atau Institusi di luar Pemerintah Kabupaten Balangan harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNSD yang akan mengikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan tinggi atau pendidikan formal adalah :

- a. Seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau Kementerian Negara/Instansi penyanggah dana lain yang berkoordinasi dengan Bupati Balangan;
- b. Penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas belajar diusulkan oleh atasan PNSD bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan pada Bupati.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus melampirkan :

- a. Surat permohonan kepada Bupati Up. Kepala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan SKPD;
- b. Fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- d. Fotocopy sah Ijazah terakhir;
- e. Uraian tugas jabatan PNSD yang bersangkutan disahkan oleh pimpinan SKPD;
- f. Daftar riwayat hidup;
- g. Surat jaminan pembiayaan dari penyanggah dana;
- h. Surat keterangan Kesehatan dari Tim Penguji;
- i. Surat keterangan tidak sedang dalam proses, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

Pasal 10

PNSD yang mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal lainnya dibebaskan dari jabatan/pekerjaannya.

Pasal 11

- (1) Batas waktu toleransi pemberian bantuan pendidikan adalah 1 (satu) semester dari batas normal studi untuk masing-masing jenjang pendidikan atau program yang diikuti;
- (2) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan Bupati, PNSD yang telah mendapat toleransi bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan bantuan pendidikan berupa SPP untuk (1) satu semester lagi apabila ada alasan yang kuat untuk pemberian dimaksud;
- (3) Batas waktu pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan;
- (2) Dalam hal PNSD yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam batas waktu normal, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Bupati dapat memperpanjang waktu studinya paling lama 2 (dua) semester dari batas maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal diluar kesalahan PNSD yang bersangkutan;
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNSD yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka Bupati dapat mencabut Keputusan tugas belajarnya.

Pasal 13

- (1) PNSD yang mengikuti tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuhnya secara periodik per semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Bupati melalui BKD;
- (2) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain;
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Makalah/Skripsi/Tesis/Desertasi) kepada Bupati melalui BKD.

Pasal 14

PNSD yang mengikuti tugas belajar wajib membuat pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

PNSD tugas belajar yang tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang mampu giat belajar atau hal lain yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan;

Pasal 16

- (1) PNSD yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya;
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNSD yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajar oleh Bupati;
- (3) Jika PNSD tugas belajar terlibat narkoba/tindak pidana lainnya dan berurusan dengan pihak berwajib, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan;

Pasal 17

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Balangan :
 - a. Untuk Jenjang D.II minimal 10 Tahun;
 - b. Untuk Jenjang D.III minimal 10 Tahun;
 - c. Untuk Jenjang D.IV minimal 10 Tahun;
 - d. Untuk Jenjang S-1 minimal 10 Tahun;
 - e. Untuk Jenjang S-2 minimal 10 Tahun;
 - f. Untuk Jenjang S-3 minimal 10 Tahun.
- (2) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus mengabdikan dan bekerja terlebih dahulu pada Pemerintah Kabupaten Balangan sekurang-kurangnya :
 - a. 2 (dua) tahun bagi D.II dan D.III;
 - b. 3 (tiga) tahun bagi D.IV dan S-1;
 - c. 5 (lima) tahun bagi S-2.

- (3) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar yang kemudian bermaksud mutasi ke luar Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan apabila telah mengabdikan sesurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak ditempatkan kembali pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatas dapat dikecualikan, apabila untuk itu ada alasan yang cukup kuat bagi kepentingan kedinasan yang sangat mendesak setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

Pasal 18

Pembiayaan PNSD tugas belajar dapat berasal dari :

- a. Dana pemerintah Daerah yang meliputi Sumbangan Peningkatan Pendidikan (SPP), tunjangan tetap belajar dan biaya penunjang yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati;
- b. Dana Kementerian Negara atau Instansi penyanggah dana yang macam dan besarnya ditentukan oleh Kementerian Negara atau Instansi penyanggah dana bersangkutan;
- c. Dana Kementerian dan dana sharing Pemerintah Daerah yang macam dan besarnya ditentukan dengan peraturan atau kesepakatan bersama.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PNSD yang mengikuti tugas belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin apabila :
 - a. menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri;
 - b. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3), pasal 15, pasal 16 ayat (2) dan (3) peraturan ini.
- (2) PNSD tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila :
 - a. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. Diberhentikan dari tugas belajar karena kelalaian tidak baik seperti berjudi, main

- perempuan, narkoba, tindak pidana dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Diberhentikan dari tugas belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan ini.
 - d. Setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Jumlah pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25%;
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Bupati, PNSD yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian dimaksud ayat (3) sebagian atau seluruhnya.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 19 tidak berlaku bagi PNSD tugas belajar yang :

- a. Meninggal dunia pada saat sedang mengikuti tugas belajar;
- b. Berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).

Pasal 21

Bagi PNSD yang sudah ditetapkan sebagai PNSD tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini .

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 April 2011

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2011 NOMOR 03

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar Pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Balangan yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar;
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat diperunakan sebagaimana mestinya.

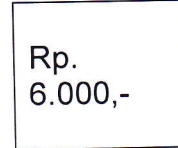
Mengetahui
an. BUPATI BALANGAN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

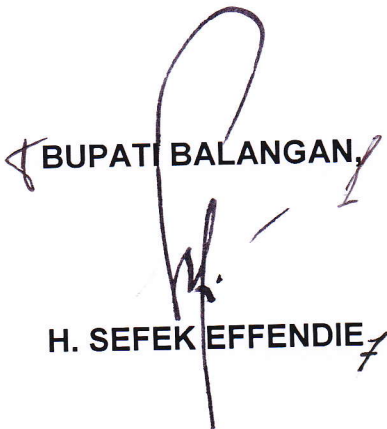
Paringin,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai



Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SELESAI TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar Pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :
Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan dengan Status Tugas Belajar Program saya menyatakan kesanggupan untuk mengabdikan pada

Pemerintah Kabupaten Balangan minimal selama :

1. 10 (sepuluh) tahun bagi Diploma dan Strata 1 (S1)
2. 10 (sepuluh) tahun bagi Strata 2 (S2) dan
3. 10 (sepuluh) tahun bagi Strata 3 (S3)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melangar maka biaya selama pendidikan yang telah diberikan akan dijadikan dasar pertimbangan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kabupaten Balangan (Kas Daerah) melalui Badan Kepegawaian Daerah

Mengetahui
Kepala SKPD
Kabupaten Balangan,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Paringin,
Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6.000,-

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGGANTI BIAYA PENDIDIKAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N I P :

Tempat, tanggal lahir :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Tugas Belajar Pada :

Program Studi / Jurusan :

Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengganti biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah guna menyelesaikan pendidikan yang dipercayakan pada saya dilembaga pendidikan sebagaimana tersebut di atas, bilamana saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan yang telah diatur dan ditentukan dikarenakan kelalaian saya sendiri dan bukan karena hal lain diluar kemampuan saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala SKPD
Kabupaten Balangan,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Paringin,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6.000,-

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

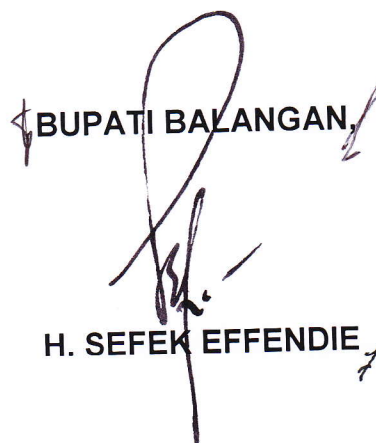
BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran IV : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 3 Tahun 2011
Tanggal 11 April 2011

**BATAS WAKTU PENIDIKAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
BATAS NORMAL STUDI,TOLERANSI PEMBERIAN BANTUAN DAN
BATAS MAKSIMALPENDIDIKAN UNTUK MASING-MASING JENJANG PENDIDIKAN**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS NORMAL STUDI	BATAS TOLERANSI BANTUAN	BATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN	KET
1	D.II	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
2	D.III	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
3	D.IV	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
4	S-1	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
5	D.III/D.IV KE S-1	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
6	S-2 (Reguler)	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun	
7	S-2 (Paket)	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
8	S-3 (Reguler)	5 Tahun	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun	
9	S-3 (Paket)	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	


BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE